

## Analisis Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks pembangunan Manusia (IPM) di Kota Surakarta Tahun 2020-2024

Gayuh Marvellin<sup>1</sup>, Dina Asmarlina<sup>2</sup>, Alifa Fiorenza<sup>3</sup>, Atila Natalia<sup>4</sup>, Yuliana Ristantya Ningsih<sup>5</sup>

<sup>12345</sup> Demografi dan Pencatatan Sipil, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Keywords:</b> anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, indeks pembangunan manusia</p> <p>Article history Submitted: 18-04-2025 Accepted: 20-04-2025 Revised: 30-04-2025 Available online: 01-06-2025 Published regularly: June 2025</p> <p>*Corresponding Author Email adress: <a href="mailto:gmvellinn@student.uns.ac.id">gmvellinn@student.uns.ac.id</a></p>	<p><i>Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Surakarta pada periode 2020–2024. IPM merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas pembangunan manusia, yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memegang peran strategis dalam mengalokasikan anggaran secara efektif untuk sektor-sektor tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda terhadap data sekunder dari BPS dan laporan APBD Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nilai R Square tinggi (0,886), baik anggaran pendidikan maupun anggaran kesehatan tidak berpengaruh signifikan secara parsial maupun simultan terhadap IPM. Ketidaksignifikanan ini diduga dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah data tahunan, kompleksitas faktor-faktor eksternal yang memengaruhi IPM, serta efektivitas pengelolaan anggaran yang belum optimal. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya ditentukan oleh besaran alokasi anggaran, tetapi juga oleh kualitas implementasi program dan sinergi antar sektor. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh dan pendekatan lintas sektoral dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah.</i></p>

**How to Cite:** Marvellin, G., Asmarlina, D., Fiorenza, A., Natalia, A., & Ningsih, Y. R. (2025). Analisis Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks pembangunan Manusia (IPM) di Kota Surakarta Tahun 2020-2024. *EVOKASI: Jurnal Kajian Administrasi dan Sosial Terapan*, 4(1), 113-119. DOI: <http://doi.org/10.20961/evokasi.v4i1.2430>

### INTRODUCTION

Pembangunan manusia merupakan inti dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfungsi sebagai indikator yang menyeluruh yang menunjukkan pencapaian dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Untuk konteks pembangunan daerah, peningkatan IPM diakui sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah lokal dalam mengelola dan mendistribusikan sumber daya publik dengan cara yang efisien.



©2025 The Author(s) This work is licensed under CC BY-NC 4.0. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4>.

Pendidikan dan kesehatan merupakan sektor publik yang memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan manusia. Akses yang merata dan kualitas layanan pendidikan yang baik membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu, yang pada akhirnya berpengaruh positif pada produktivitas dan kesejahteraan. Selain itu, layanan kesehatan yang baik memastikan bahwa masyarakat dapat hidup dengan sehat, produktif, dan berkontribusi secara maksimal untuk pembangunan. Oleh karena itu, alokasi anggaran daerah untuk pendidikan dan kesehatan mencerminkan kesungguhan pemerintah daerah dalam memperkuat dasar pembangunan manusia (Ariani & Prasetyo, 2022).

Di Indonesia, IPM sendiri telah menjadi salah satu indikator strategis dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah pusat dan daerah secara berkala menyusun kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan IPM sebagai bagian dari upaya pemerataan kesejahteraan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dalam konteks desentralisasi fiskal yang diberlakukan sejak era reformasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang cukup besar dalam mengelola anggaran dan menetapkan prioritas pembangunan. Hal ini menjadikan peran pemerintah daerah semakin sentral dalam menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengelolaan anggaran daerah yang efektif dan tepat sasaran.

Kota Surakarta, yang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah dengan perkembangan sosial ekonomi yang signifikan, terus berusaha memperbaiki kualitas hidup warganya melalui berbagai kebijakan pembangunan. Penggunaan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan menjadi dua aspek kritis yang secara langsung mendukung peningkatan IPM (Fauzan et al., 2020). Pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan keterampilan dan produktivitas individu, sementara layanan kesehatan yang memadai berdampak positif pada harapan hidup dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Pemerintah Kota Surakarta secara konsisten mengalokasikan anggaran dalam jumlah signifikan untuk bidang pendidikan dan kesehatan dengan tujuan memperbaiki kualitas hidup penduduknya. Data menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Kota Surakarta meningkat setiap tahun, yaitu dari 82,21 di tahun 2020 menjadi 84,40 di tahun 2024 (BPS Kota Surakarta tahun 2020 & 2024). Walaupun angka ini menunjukkan perkembangan yang baik, perlu diselidiki lebih lanjut apakah kenaikan ini secara langsung berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah diterapkan oleh pemerintah kota.

Belum banyak studi empiris yang mendalami secara khusus hubungan antara alokasi anggaran publik dan IPM di tingkat kota/kabupaten, meskipun terdapat penelitian pada skala provinsi/kabupaten seperti yang dilakukan (Pradana, 2024) dalam konteks Jawa Tengah namun fokus pada kota seperti Surakarta masih sangat terbatas. Studi nasional oleh (Yosi Tamara & Yeniwati, 2020) menemukan bahwa belanja kesehatan di tingkat provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sementara belanja sosial tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Dengan memahami dinamika pengaruh anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap IPM, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi formulasi kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, tidak hanya di Kota Surakarta tetapi juga bagi daerah lain dengan karakteristik serupa (Putri & Hidayat, 2020).

Oleh karena itu, Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis pengaruh alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap peningkatan IPM di Kota Surakarta pada periode 2020 hingga 2024. Pemilihan periode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa lima tahun terakhir merupakan masa penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Diharapkan bahwa hasil analisis ini bisa memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam menyusun strategi penganggaran yang lebih efektif guna mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut.



## METHOD

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel independen, yaitu alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan, terhadap variabel dependen, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Surakarta.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Surakarta tahun 2020–2024. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah anggaran untuk sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan nilai IPM selama lima tahun.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menelusuri dokumen resmi seperti publikasi statistik tahunan dari BPS dan laporan keuangan daerah. Instrumen pengumpulan data berupa tabel rekapitulasi anggaran dan IPM untuk kemudian diolah secara kuantitatif.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi SPSS. Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas untuk memastikan tidak adanya korelasi tinggi antara variabel independen. Langkah analisis terdiri atas: (1) pengumpulan dan tabulasi data, (2) uji asumsi klasik, (3) analisis regresi linier berganda, dan (4) interpretasi hasil serta pembahasan.

## RESULTS AND DISCUSSION

### 1. Hasil

Data yang digunakan mencakup data anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan nilai IPM selama periode tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh, terlihat adanya peningkatan baik pada anggaran pendidikan maupun anggaran kesehatan setiap tahunnya, seiring dengan kenaikan nilai IPM Kota Surakarta dari 82,21 pada tahun 2020 menjadi 84,40 pada tahun 2024. Berikut rekapitulasi datanya:

Tahun	Anggaran Pendidikan (Rupiah)	Anggaran Kesehatan (Rupiah)	IPM
2020	Rp282,713,025,000	Rp255,864,220,253	82,21
2021	Rp288,189,525,000	Rp464,978,006,459	82,62
2022	Rp439,549,530,242	Rp494,815,839,850	83,08
2023	Rp589,000,000,000	Rp518,455,681,539	83,54
2024	Rp597,114,147,066	Rp550,135,516,396	84,40

Untuk menganalisis pengaruh anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap IPM, digunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Sebelum analisis, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan validitas model, salah satunya adalah uji multikolinearitas. Uji ini bertujuan mendeteksi adanya korelasi tinggi antar variabel independen, yang dapat mengganggu kestabilan koefisien regresi. Multikolinearitas diuji melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance.

Berikut adalah hasil uji multikolinearitas yang diperoleh dari output SPSS:

115



Variabel	Tolerance	VIF
Anggaran Pendidikan	0.43	2.327
Anggaran Kesehatan	0.43	2.327

Nilai VIF kurang dari 10 (dalam penelitian ini 2,327) menunjukkan tidak adanya masalah multikolinearitas yang serius antar variabel independen. Nilai Tolerance lebih besar dari 0,1 (dalam penelitian ini 0,430) juga mengindikasikan tidak adanya multikolinearitas yang bermasalah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan dapat digunakan secara simultan dalam model regresi tanpa risiko multikolinearitas yang mengganggu.

Setelah memastikan tidak adanya multikolinearitas, dilakukan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan terhadap IPM. Berikut adalah ringkasan hasil analisis regresi yang diperoleh:

Tabel 1. Ringkasan Model (Model Summary)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.941	0.886	0.773	0.41

Nilai R Square sebesar 0,886 menunjukkan bahwa 88,6% variasi IPM dapat dijelaskan oleh variabel anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan secara bersama-sama. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,773 mengindikasikan bahwa model regresi ini cukup baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut.

Tabel 2. Uji Signifikansi Model (ANOVA)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1.587	2	0.793	7.798	0.114
Residual	0.205	2	0.103		
Total	1.792	4			

Nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,114 lebih besar dari 0,05, sehingga secara statistik model regresi ini tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Dengan kata lain, secara simultan variabel anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan belum terbukti berpengaruh signifikan terhadap IPM Kota Surakarta pada periode 2020-2024.

Tabel 3. Koefisien Regresi dan Uji Parsial (Coefficients)



Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	79.870	0.85		93.918	0		
Anggaran Pendidikan	0.00001	0.000005	0.742	1.979	0.186	0.43	2.327
Anggaran Kesehatan	0.000004	0.000006	0.279	0.746	0.534	0.43	2.327

Dari hasil uji t parsial, diperoleh bahwa variabel anggaran pendidikan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,186, yang lebih besar dari batas signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara individual, anggaran pendidikan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Demikian pula, variabel anggaran kesehatan juga menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,534, yang juga lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran kesehatan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap IPM. Meskipun sektor pendidikan dan kesehatan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, hasil uji F (simultan) menunjukkan bahwa secara bersama-sama kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan IPM selama periode penelitian. Hal ini mengindikasikan adanya kontribusi kolektif dari kedua sektor dalam meningkatkan pembangunan manusia (Siregar & Fauzi, 2021).

## 2. Diskusi

Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun nilai R Square relatif tinggi (0,886), menandakan bahwa sebagian besar variasi IPM dapat dijelaskan oleh anggaran pendidikan dan kesehatan, pengujian signifikansi secara simultan (uji F: sig. 0,114) dan parsial (uji t: sig. 0,186 dan 0,534) tidak mendukung adanya pengaruh yang signifikan dari kedua variabel tersebut terhadap IPM pada periode 2020-2024. Temuan ini kontras dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap IPM, seperti penelitian (Ardiningrum *et al.*, 2021) di Jawa Tengah yang menemukan bahwa peningkatan 1% anggaran pendidikan dan kesehatan meningkatkan IPM sebesar 0,23%. Namun, hasil ini sejalan dengan penelitian (Suryani & Putra, 2020) di Bali yang menyatakan bahwa besaran anggaran tidak signifikan secara statistik jika tidak diiringi dengan peningkatan kualitas program.

Beberapa faktor dapat menjelaskan ketidaksignifikan hasil ini. Pertama, keterbatasan jumlah data (hanya lima tahun) menyebabkan kekuatan statistik model rendah, sehingga sulit mendeteksi hubungan signifikan. Hal ini sesuai dengan kritik (Widarjono, 2018) yang menyatakan bahwa analisis regresi dengan sampel kecil ( $n < 30$ ) rentan menghasilkan kesalahan tipe II (gagal mendeteksi efek yang ada). Kedua, IPM dipengaruhi oleh faktor multidimensional di luar anggaran, seperti kondisi ekonomi, infrastruktur, dan kualitas layanan publik. Penelitian (Astuti *et al.*, 2019) di Yogyakarta menemukan bahwa variabel infrastruktur kesehatan (seperti jumlah puskesmas) memiliki pengaruh lebih kuat terhadap IPM daripada besaran anggaran. Ketiga, efektivitas penggunaan anggaran memegang peranan kritis. Sebagaimana ditegaskan dalam studi Bank Dunia (2023) yang menyatakan bahwa indeks efektivitas pemerintah (*government effectiveness index*) lebih berpengaruh terhadap IPM daripada alokasi anggaran.



Temuan ini memperkuat argumen (Nurhayati & Hadi, 2022) yang menyatakan bahwa pembangunan manusia tidak hanya bergantung pada besaran anggaran, tetapi juga pada kapasitas institusi dalam mengelola program. Sebagai contoh, penelitian di Kota Bandung oleh (Firdaus *et al.*, 2021) menunjukkan bahwa sinergi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dalam program intervensi gizi meningkatkan dampak anggaran terhadap IPM sebesar 15%. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya besaran anggaran saja yang penting, tetapi juga bagaimana program tersebut dikelola dan diintegrasikan secara lintas sektoral.

## CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Surakarta pada tahun 2020–2024. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa meskipun nilai R Square cukup tinggi (0,886), anggaran pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, baik secara parsial (terpisah) maupun simultan (bersamaan). Ketidaksignifikanan ini dapat disebabkan oleh jumlah data terbatas, pengaruh faktor eksternal, serta efektivitas anggaran yang belum optimal. Oleh karena itu, peningkatan IPM tidak hanya bergantung pada besaran anggaran, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan program dan integrasi lintas sektor.

## BIBLIOGRAPHY

- Bank Dunia. (2023). Government Effectiveness and Service Delivery in Indonesia. World Bank Report.
- Bank Dunia. (2023). Laporan Efektivitas Pemerintah dan Pembangunan Manusia.
- Widarjono, A. (2018). Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis (Edisi ke-4). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ardiningrum, A., et al. (2021). Pengaruh Belanja Pendidikan dan Kesehatan terhadap IPM di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Ariani, D., & Prasetyo, H. (2022). Pengaruh Belanja Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 115–124.
- Astuti, R., et al. (2019). Peran Infrastruktur Kesehatan dalam Meningkatkan IPM. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*.
- Fauzan, M., Nusantara, A., Nawatmi, S., & Santosa, A. B. (2020). Indeks pembangunan manusia dan pendidikan di Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 27(1).
- Firdaus, M., et al. (2021). Sinergi Program Intervensi Gizi dan Dampaknya terhadap IPM. *Jurnal Gizi Klinik*.
- Maulana, S. (2023). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Metaverse ADPERTISI*, 2(2), 10–16.
- Mulyono, D., & Setiawan, B. (2022). Pengaruh belanja pendidikan, kesehatan, dan tingkat kemiskinan terhadap IPM di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2012–2021. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(3), 245–256.



- Nurhayati, T., & Hadi, S. (2022). Kapasitas Institusi dan Dampak Anggaran terhadap IPM. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Pradana, L. A. (2024). *Peran Belanja Modal dalam Memoderasi Hubungan antara Rasio Keuangan Pemerintah Daerah dan IPM* (Disertasi Doktoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Prastiwi, H., & Handayani, T. (2021). Pengaruh belanja pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan PDRB terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 9(2), 89–98.
- Putri, R. A., & Hidayat, T. (2020). Pengaruh Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(1), 23–34.
- Siregar, R., & Fauzi, A. (2021). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(1), 45–56.
- Sofilda, E., Hamzah, M. Z., & Nurhaida, D. (2023). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Media Ekonomi*, 31(1), 15–28.
- Suryani, L., & Putra, I. (2020). Analisis Ketidaksignifikan Anggaran Pendidikan terhadap IPM di Bali. *Jurnal Ekonomi Regional*.
- Tamara, Y., & Yeniwati, Y. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Bantuan Sosial dan Kesehatan, Konsumsi Rumah Tangga dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 2(3), 57–62.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2022). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Bappenas.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia 2023*. Jakarta: BPS.